

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
 - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
 - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
 - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2014

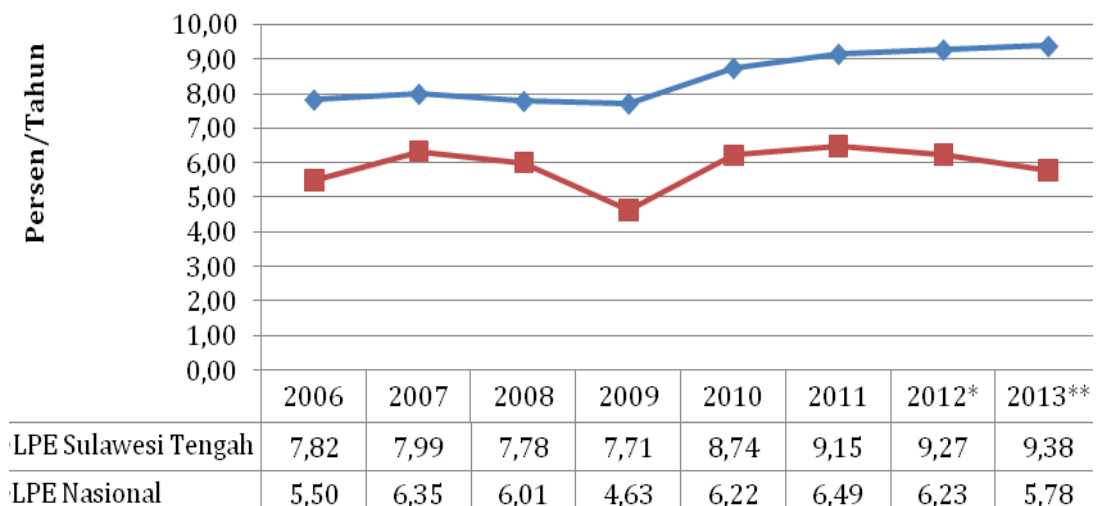
SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan nikel, dengan hasil perkebunan yang dominan di provinsi ini yaitu kakao. Kinerja perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2006-2013 cukup baik, terlihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 200 tumbuh dengan laju rata-rata 8,48 persen per tahun (Gambar 1). Laju ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) yang berada pada angka 5,90 per tahun pada periode yang sama. Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Tengah menjadi yang paling rendah di wilayah Sulawesi yaitu sebesar 16,00 persen, sementara itu memberikan sumbangan sebesar 0,77 persen terhadap pembentukan PDB Nasional.

Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000

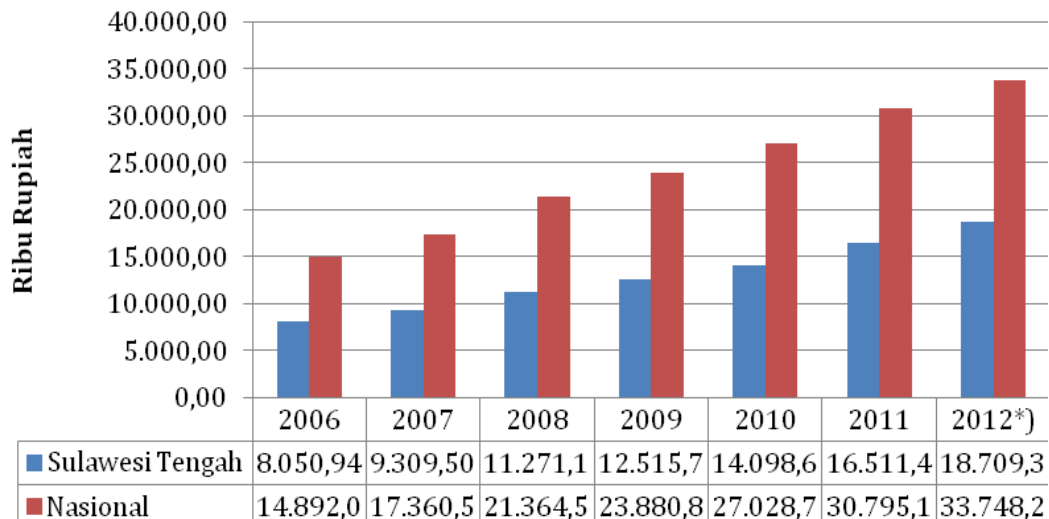


Sumber: BPS, 2013

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di Sulawesi Tengah berada di bawah rata-rata nasional, menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Sulawesi Tengah relatif tidak baik secara nasional (Gambar 2). Namun demikian, PDRB perkapita Sulawesi Tengah cenderung meningkat, menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk selama periode 2006-2012 juga meningkat. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB perkapita Sulawesi Tengah dan PDB perkapita nasional adalah sebesar 54,06 persen, maka pada tahun 2012 rasionya meningkat menjadi 55,43 persen. Apabila

pertumbuhan penduduk antar provinsi tidak terlalu berbeda jauh, kinerja rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah telah berkembang lebih baik.

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

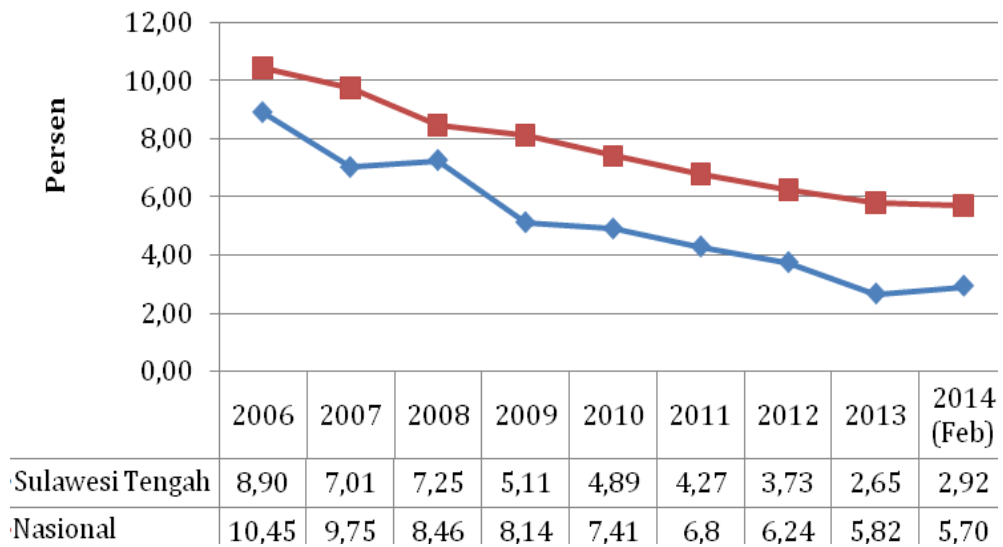


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 2006-2013 berkurang sebesar 6,25 persen. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun. TPT Sulawesi Tengah termasuk rendah bila dibandingkan dengan TPT nasional (Gambar 3). Namun demikian tingginya tingkat pengangguran di tengah pendapatan per kapita yang moderat mengindikasikan bahwa pengangguran tersebut kemungkinan besar merupakan tenaga yang tidak terdidik karena tidak berimbas langsung pada rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

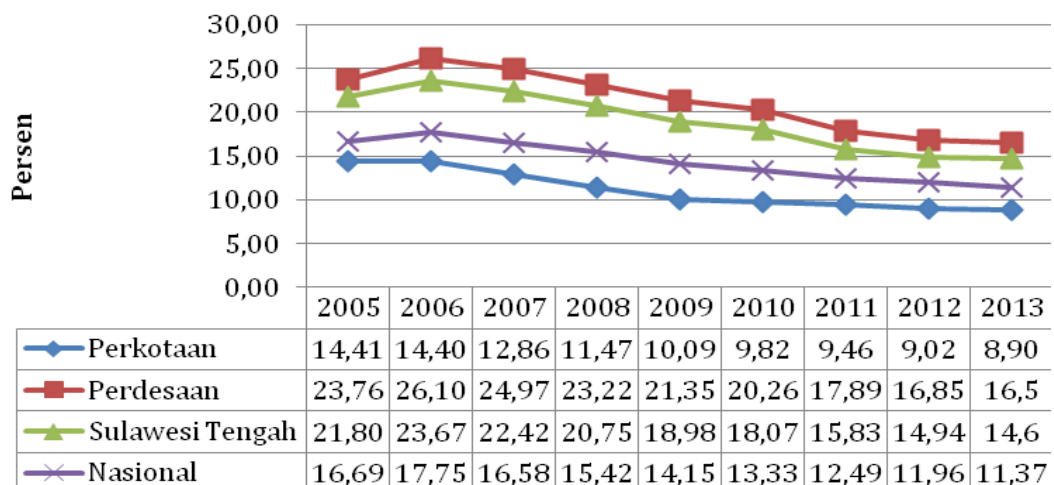


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Selama periode 2005-2012 persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah cenderung berkurang terutama di perkotaan, dan mencapai 14,6 persen pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan penduduk Sulawesi Tengah lebih tinggi dibandingkan nasional pada periode yang sama. Jika pada tahun 2013 persentase penduduk miskin nasional sudah mencapai 11,37 persen, maka tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah masih berada di angka 14,6 persen (Gambar 4). Di tingkat Wilayah Sulawesi, kondisi kemiskinan di Sulawesi Tengah ini merupakan yang tertinggi kedua setelah Provinsi Gorontalo.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2013

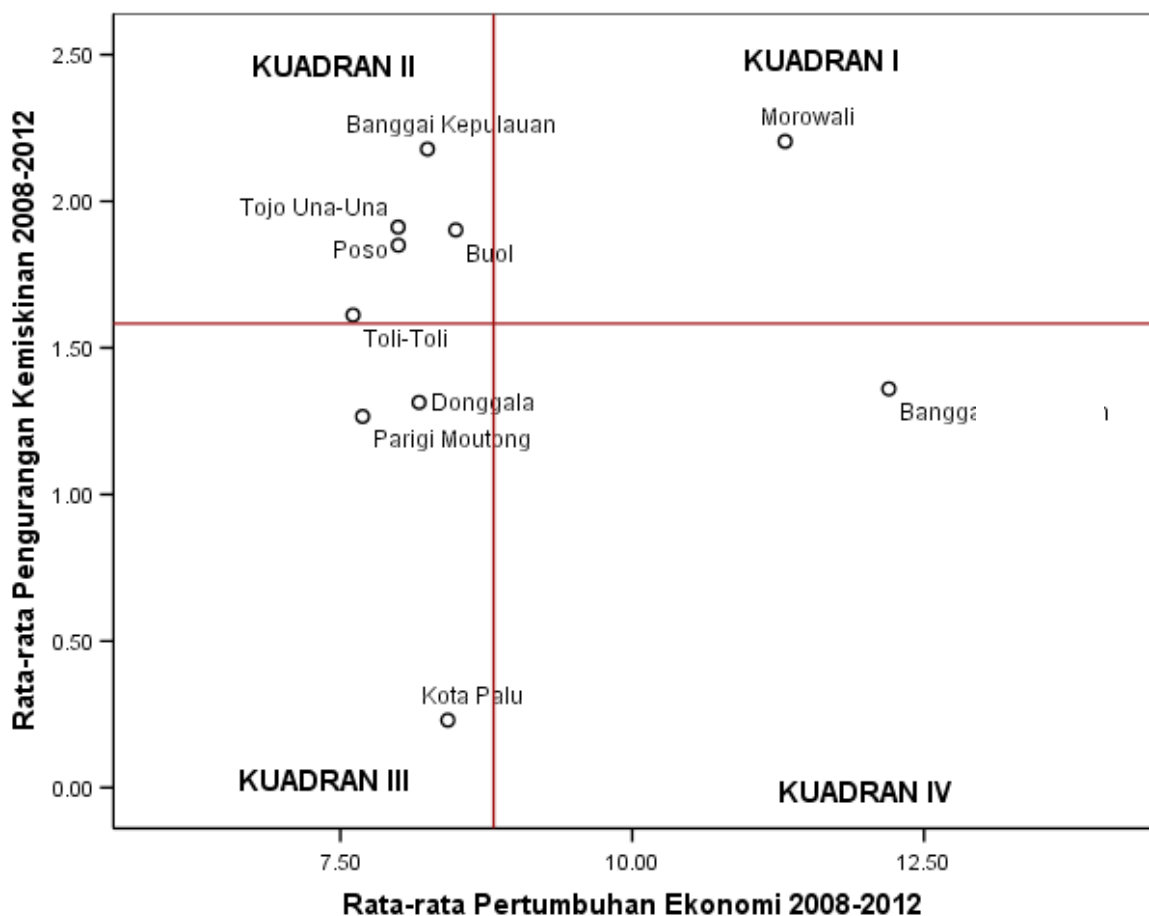
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, Kabupaten Morowali merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kedua, Kabupaten Banggai Kepulauan, Toja Una-una, Poso, Buol dan Toli-toli terletak di kuadran II, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi tetapi rata-rata pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga, Kabupaten Donggala, Prigi Moutong, dan Kota Palu terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

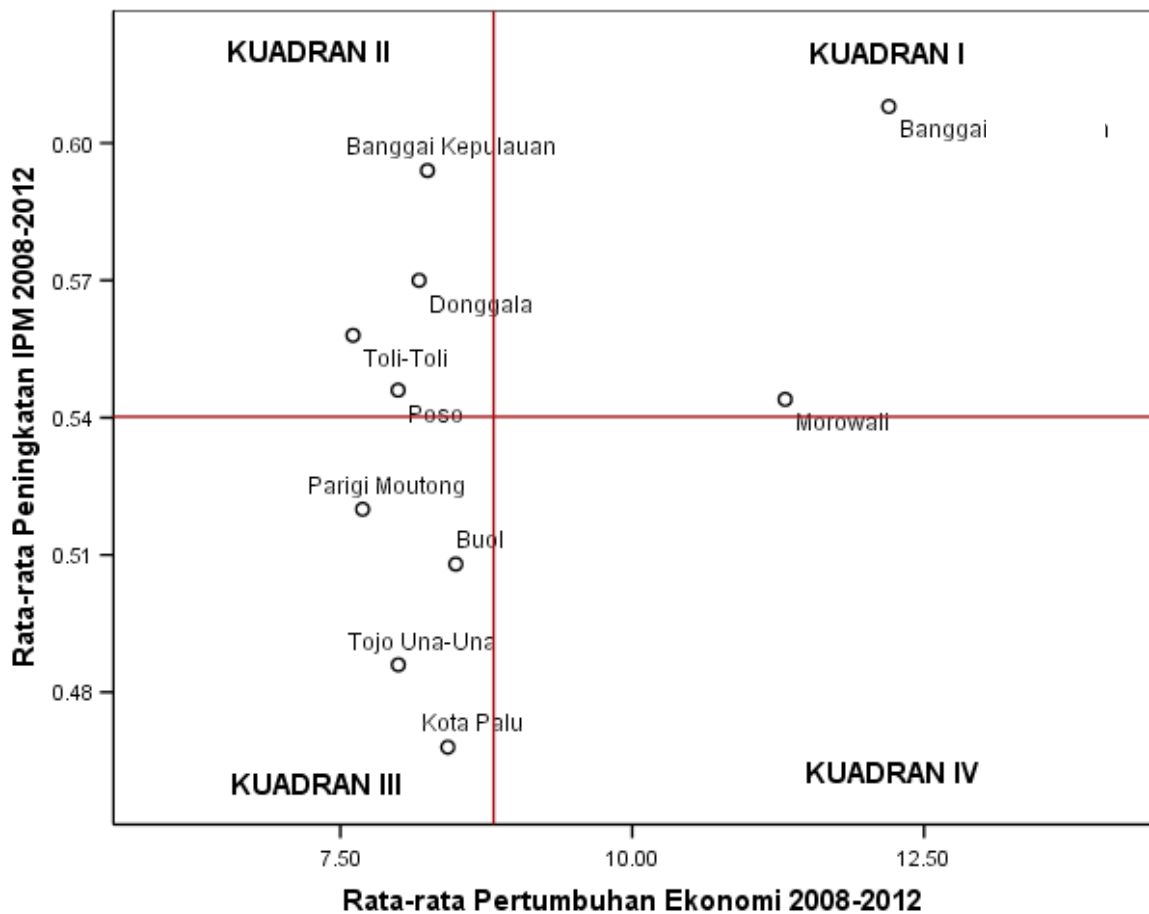
Keempat, Kabupaten Banggai terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. Pertama, Kabupaten Morowali dan Banggai merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Poso, Donggala, Toli-toli, dan Banggai Kepulauan terletak di kuadran II, termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Ketiga, Kabupaten Buol, Parigi Moutong, Tojo Una-una, dan Kota Palu terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Keempat, Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah tidak ada yang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*).

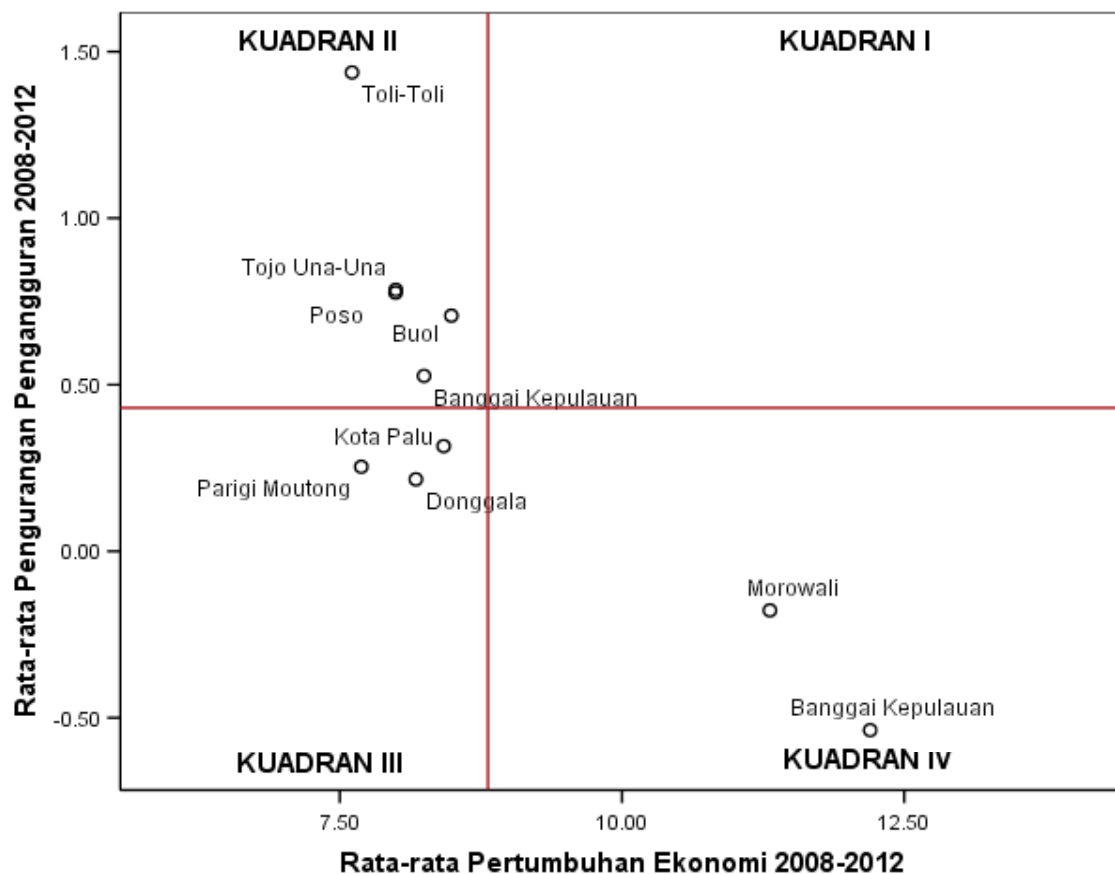
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. Pertama, tidak ada kabupaten yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan

bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. *Kedua*, Kabupaten Toli-toli, Tojo Una-una, Poso, Buol, dan Banggai Kepulauan yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Kabupaten Parigi Moutong, Donggala, dan Kota Palu terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



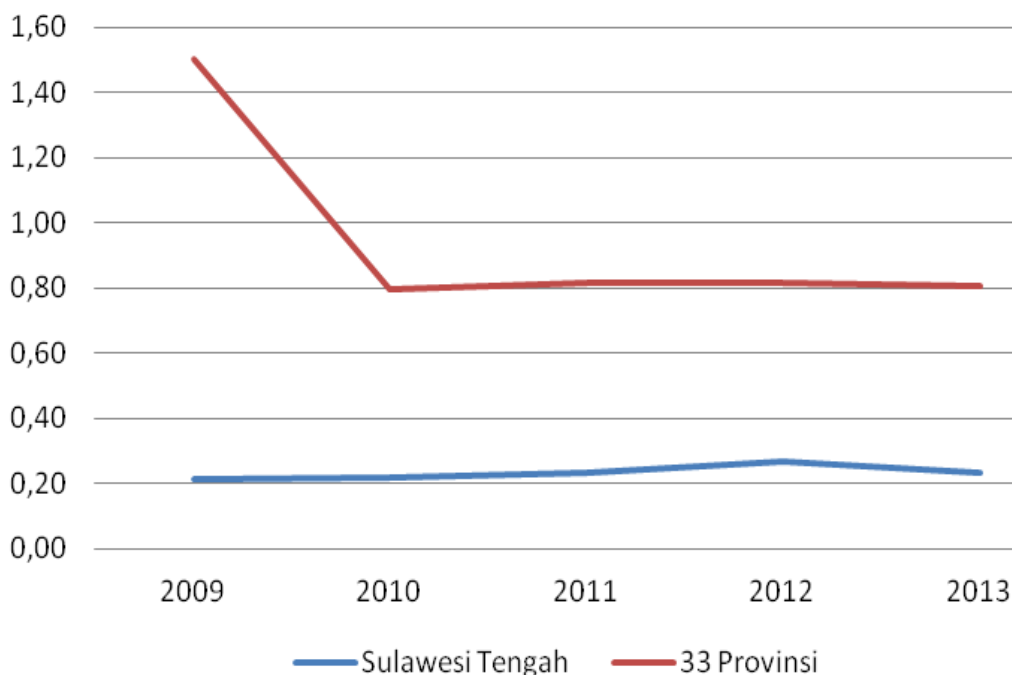
Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Keempat, Kabupaten Morowali dan Banggai terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang ditunjukkan dengan nilai indeks williamson dari tahun 2009-2013 berada di bawah nasional dengan kecenderungan semakin meningkat. Kesenjangan ekonomi wilayah Sulawesi Tengah termasuk dalam kelompok kesenjangan rendah. Rata-rata nilai indeks williamson nasional pada periode yang sama sebesar 0,95 cukup jauh berada di atas nilai masing-masing wilayah di Indonesia.

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

Sementara itu, kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah juga cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Kota dan kabupaten di

Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki PDRB per kapita tinggi kemungkinan disebabkan karena berkembangnya sektor tersier dalam perekonomian, seperti sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/ Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Banggai Kepulauan	5.700	6.788	7.675	8.677	9.851	11.090
Banggai	7.669	9.076	10.705	12.811	15.628	19.376
Morowali	11.040	13.583	14.720	17.962	22.511	24.342
Poso	8.162	8.882	9.467	10.183	11.540	12.486
Donggala	9.070	10.789	11.721	13.459	15.668	18.439
Toli-Toli	8.249	9.789	11.193	12.716	14.425	16.224
Buol	6.679	7.874	8.783	9.850	11.222	12.755
Parigi Moutong	10.287	12.142	13.554	15.228	17.135	19.255
Tojo Una-una	5.265	6.625	7.719	8.700	9.859	11.191
Kab Sigi	-	-	12.961	14.590	16.364	18.700
Kota Palu	11.897	14.257	16.074	18.178	20.805	23.813
SULAWESI TENGAH	9.309	11.302	12.516	14.099	16.511	18.709

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Pertanian

Struktur perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi sektor pertanian, diikuti perdagangan, konstruksi, dan pertambangan (Tabel 2). Pada laporan triwulan II 2014 perekonomian Sulawesi Utara turun secara signifikan dari periode sebelumnya. Penurunan kinerja produksi dan ekspor tambang pasca kebijakan larangan ekspor mentah minerba dan menurunnya kinerja subsektor perkebunan menjadi faktor utama memburuknya perekonomian pada triwulan laporan (Bank Indonesia, 2014). Sektor-sektor ekonomi dengan nominal besar menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi meskipun pertumbuhan sektor yang bersangkutan relatif kecil, demikian juga sebaliknya.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	38,99	36,66
2.	Pertambangan	9,56	8,18
3.	Industri Pengolahan	7,16	5,58
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,74	0,70
5.	Konstruksi	9,38	8,01
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	13,41	12,66
7.	Angkutan, Telekomunikasi	7,85	7,37
8.	Keuangan	5,88	4,93
9.	Jasa-jasa	7,03	15,91
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Apabila ditelusuri lebih lanjut, sektor basis di Provinsi Sulawesi Tengah antara lain pertanian, dan jasa-jasa, seperti ditunjukkan pada nilai Location Quotion (LQ) tahun 2008-2012 (Tabel 3). Kedua sektor tersebut memiliki nilai $LQ > 1$, mengindikasikan keunggulan komparatif dibandingkan daerah-daerah lain. Sektor pertanian merupakan sektor dengan nilai tertinggi selama tahun 2008-2012. Sub sektor perkebunan, kehutanan, dan perikanan mendominasi tingginya nilai sektor pertanian ini. Hal ini menunjukkan Sulawesi Tengah memiliki *proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor-sektor tersebut. Komoditas unggulan dari masing-masing sektor pertanian tersebut adalah kakao, kayu hitam, rotan, dan perikanan tangkap. Nilai LQ masing-masing subsektor dari sektor pertanian sangat tinggi, menunjukkan share subsektor tersebut di Provinsi Sulawesi Tengah secara proporsional lebih tinggi dari nasional. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki keunggulan komparatif pada sektor tersebut dibandingkan daerah lain.

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	3,04	3,02	3,04	3,06	3,03
a. Tanaman Bahan Makanan	1,95	1,90	1,90	1,91	1,89
b. Tanaman Perkebunan	7,29	7,39	7,50	7,53	7,35
c. Peternakan	1,40	1,42	1,41	1,41	1,39
d. Kehutanan	4,99	5,12	5,11	5,24	5,48
e. Perikanan	2,83	2,85	2,83	2,79	2,74
2. Pertambangan dan Penggalan	0,44	0,44	0,56	0,74	0,90
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,42	0,37	0,40	0,41	0,41
b. Pertambangan Bukan Migas	0,00	0,07	0,38	0,82	1,17
c. Penggalan	1,84	1,90	1,78	1,76	1,82
3. Industri Pengolahan	0,24	0,25	0,24	0,23	0,23
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,26	0,27	0,26	0,25	0,24
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,99	0,93	0,92	0,92	0,91
a. Listrik	1,32	1,32	1,28	1,24	1,21
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	0,93	1,00	0,98	1,03	1,03
5. Konstruksi	1,06	1,04	1,04	1,11	1,18
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0,73	0,76	0,75	0,72	0,71
a. Perdagangan Besar dan Eceran	0,83	0,87	0,85	0,82	0,80
b. Hotel	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28
c. Restoran	0,23	0,22	0,23	0,23	0,23
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,93	0,86	0,80	0,76	0,73
a. Pengangkutan	1,90	1,91	1,89	1,84	1,82
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
2). Angkutan Jalan Raya	3,30	3,28	3,30	3,24	3,19
3). Angkutan Laut	1,95	2,14	2,25	2,31	2,31
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,21	0,19	0,22	0,21	0,23
5). Angkutan Udara	0,57	0,60	0,56	0,52	0,52
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,59	0,61	0,61	0,61	0,61
b. Komunikasi	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,49	0,49	0,50	0,50	0,49
a. Bank	0,47	0,48	0,53	0,54	0,52
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,59	0,56	0,54	0,52	0,53
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,54	0,54	0,53	0,51	0,51
e. Jasa Perusahaan	0,43	0,44	0,42	0,41	0,41
9. Jasa-jasa	1,74	1,73	1,74	1,71	1,72
a. Pemerintahan Umum	2,69	2,71	2,81	2,82	2,95
b. Swasta	1,01	0,98	0,95	0,91	0,87
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,96	0,94	0,94	0,92	0,89
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	1,14	1,09	1,05	1,00	0,96

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Tabel 4

Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2011-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	703.949	642.485	(61.464)
2	Pertambangan	21.997	37.268	15.271
3	Industri Pengolahan	51.382	77.769	26.387
4	Listrik, Gas, Air	1.602	5.920	4.318
5	Bangunan	44.432	74.825	30.393
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	187.108	216.896	29.788
7	Angkutan & Telekomunikasi	38.917	56.566	17.649
8	Keuangan	9.701	17.342	7.641
9	Jasa-Jasa	164.891	257.032	92.141
	Total	1.223.979	1.386.103	162.124

Sumber: BPS, 2014

Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Tengah. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan

sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja. Selama periode 2008-2012, meski pangasanya masih kecil sektor industri pengolahan mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor jasa-jasa yang kurang produktif.

2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah adalah pada sektor konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 57,79 persen. Sementara itu sektor PMTB (investasi) yang sangat penting bagi pertumbuhan daerah berkontribusi sebesar 21,64 persen (Tabel 5). Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk berproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Namun demikian terdapat tren meningkatnya pertumbuhan investasi. Meskipun konsumsi rumah tangga masih tetap merupakan sumber utama pertumbuhan daerah, namun selama periode 2008-2013 peran investasi semakin meningkat dan menggeser konsumsi pemerintah sebagai sumber pertumbuhan kedua.

Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan, peningkatan sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana investasi yang memadai.

Tabel 5
PDRB Menurut Penggunaan 2013

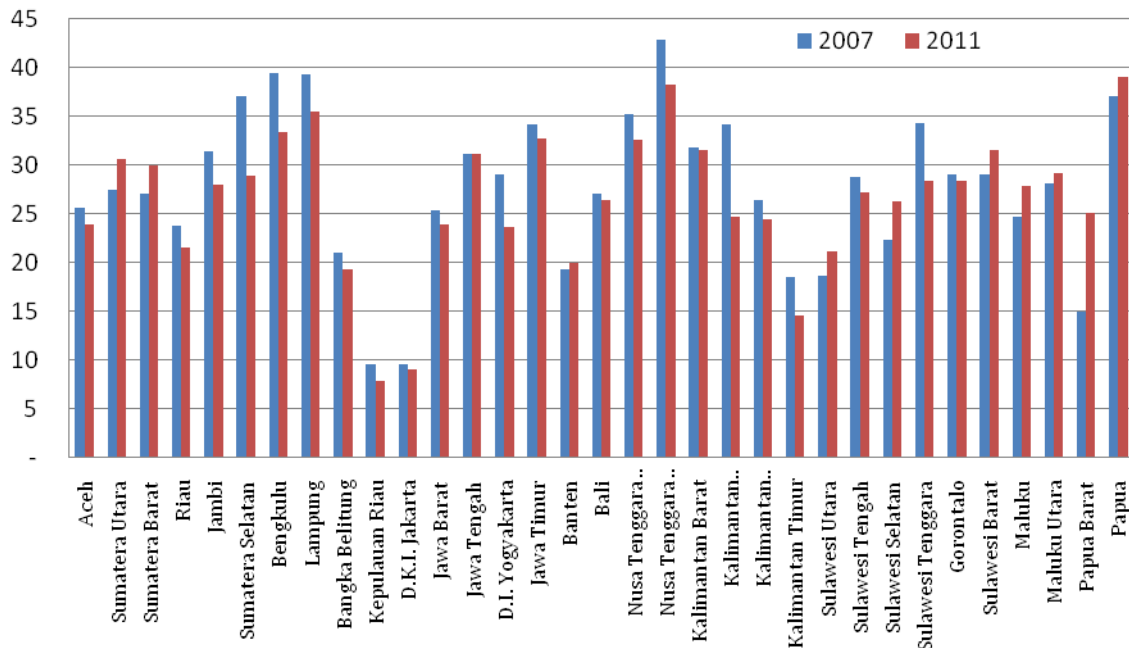
No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	57,79	53,62
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	1,49	1,27
3.	Konsumsi Pemerintah	17,20	16,97
4.	PMTB	21,64	22,73
5.	Perubahan Stok	1,27	1,13
6.	Ekspor	18,09	16,65
7.	Impor	17,48	12,47
	Total	100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

3. Rendahnya Kualitas lapangan Kerja

Kualitas lapangan kerja yang tercipta selama periode tahun 2007-2011 di Sulawesi Tengah relatif menurun (Gambar 9). Rendahnya kualitas lapangan kerja terkait dengan tingginya kemiskinan dan tingkat pengangguran di daerah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, yaitu pekerja yang terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian tinggi sehingga rentan terhadap guncangan ekonomi yang terjadi.

Gambar 9
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

Meskipun persentase pekerjaan kurang berkualitas di Sulawesi Tengah tahun 2011 relatif menurun dibandingkan tahun 2007, namun tergolong tinggi karena mencapai 28 persen. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas lapangan kerja adalah dengan memperluas kesempatan kerja formal, memperlancar perpindahan pekerja dari pekerjaan yang produktivitasnya rendah ke pekerjaan yang produktivitasnya tinggi, dan mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih berada di sektor informal dan mempersempit kesenjangan upah pada tingkat produktivitas yang sama. Kebijakan pembangunan sektor pertanian harus sejalan dengan kebijakan pembangunan sektor industri, seperti adanya industri berbasis pertanian (agroindustri) yang didukung oleh rantai perdagangan (agrobisnis).

4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Posisi Sulawesi Tengah yang memiliki jaringan jalan sepanjang 18.387 km relatif strategis, yang menghubungkan jaringan jalan jalur lalu lintas antar provinsi di Pulau Sulawesi. Secara kuantitas, ketersediaan jaringan jalan di Sulawesi Tengah cukup baik, yang ditunjukkan dari indikator kerapatan jalan di wilayah ini lebih tinggi dari nasional (Tabel 6).

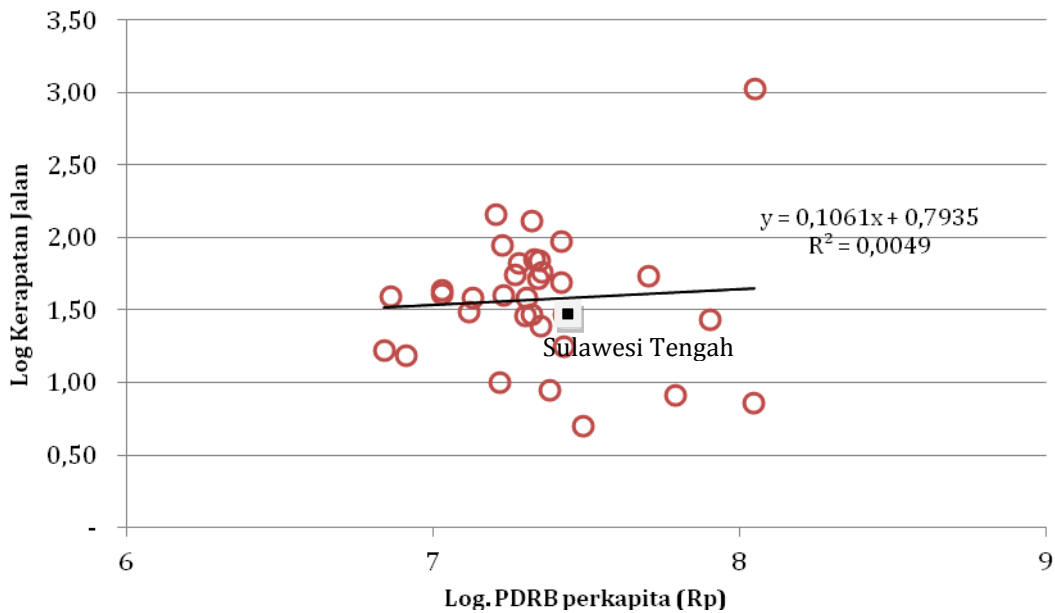
Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Dalam konteks perbandingan dengan provinsi lain di Indonesia dapat diketahui tingkat defisiensi infrastruktur wilayah. Hal ini didasarkan asumsi bahwa terdapat hubungan antara kerapatan jalan dan tingkat pendapatan per kapita pada suatu perekonomian. Dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan yang positif antara PDRB per kapita dengan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu perekonomian, kerapatan jalannya cenderung semakin tinggi pula. Posisi Sulawesi Tengah relatif belum cukup baik bila dibandingkan dengan provinsi lain. Provinsi Sulawesi Tengah mengalami defisiensi infrastruktur jalan pada tahun 2012.

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, kondisi jalan belum beraspal di Sulawesi Tengah sebesar 19 persen (Tabel 7). Kondisi ini mengurangi daya dukung pergerakan dan akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan serta meningkatkan biaya distribusi barang antardaerah, yang akan menghambat perekonomian daerah.

Tabel 7
Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012

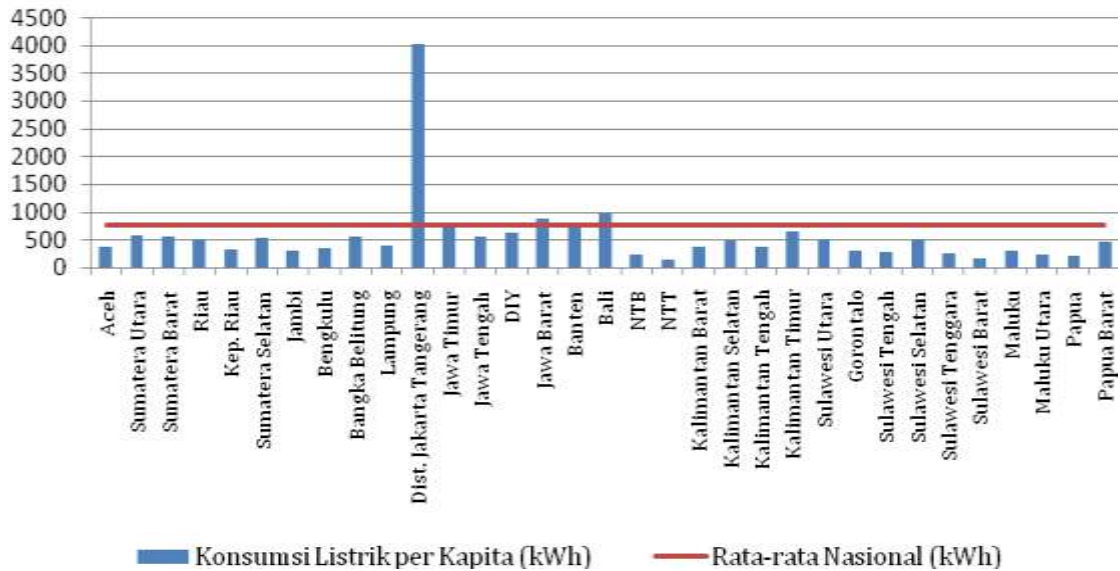
PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Sulawesi Tengah	1.656	81	218	11	153	8	10	0	2037	100
Sulawesi	5.103	81	678	11	469	8	24	0	6.274	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: BPS, 2013

Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Sulawesi Tengah termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi infrastruktur kelistrikan, digunakan analisis korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik per kapita. Dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu perekonomian, konsumsi listriknya cenderung semakin

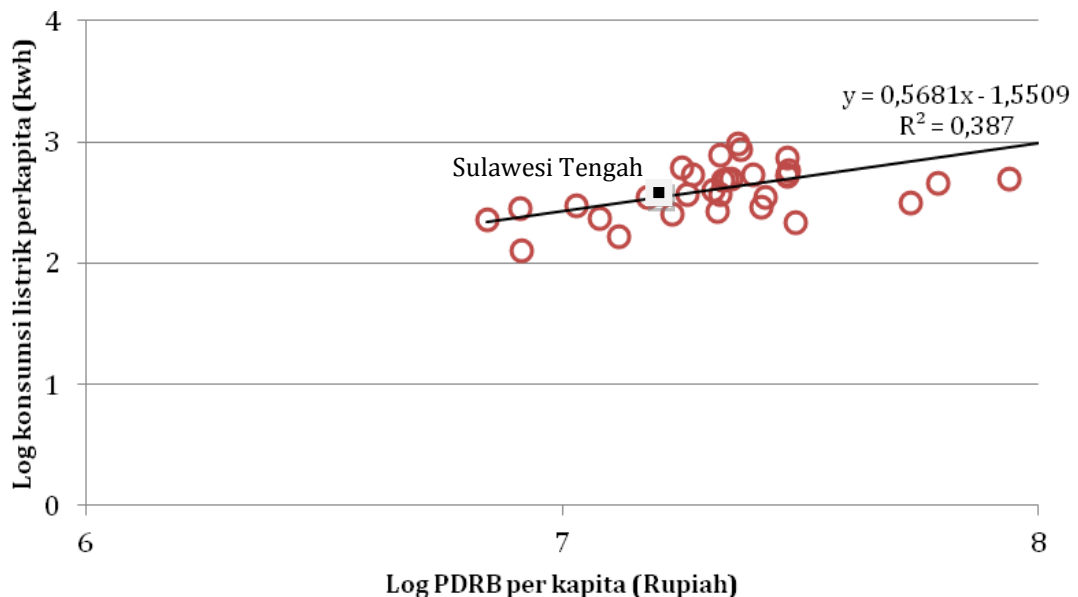
tinggi pula. Posisi Sulawesi Tengah berada di sedikit di bawah pada kurva linier, menunjukkan ketersediaan jaringan listrik menjadi masih menjadi salah satu masalah di Sulawesi Tengah.

Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013

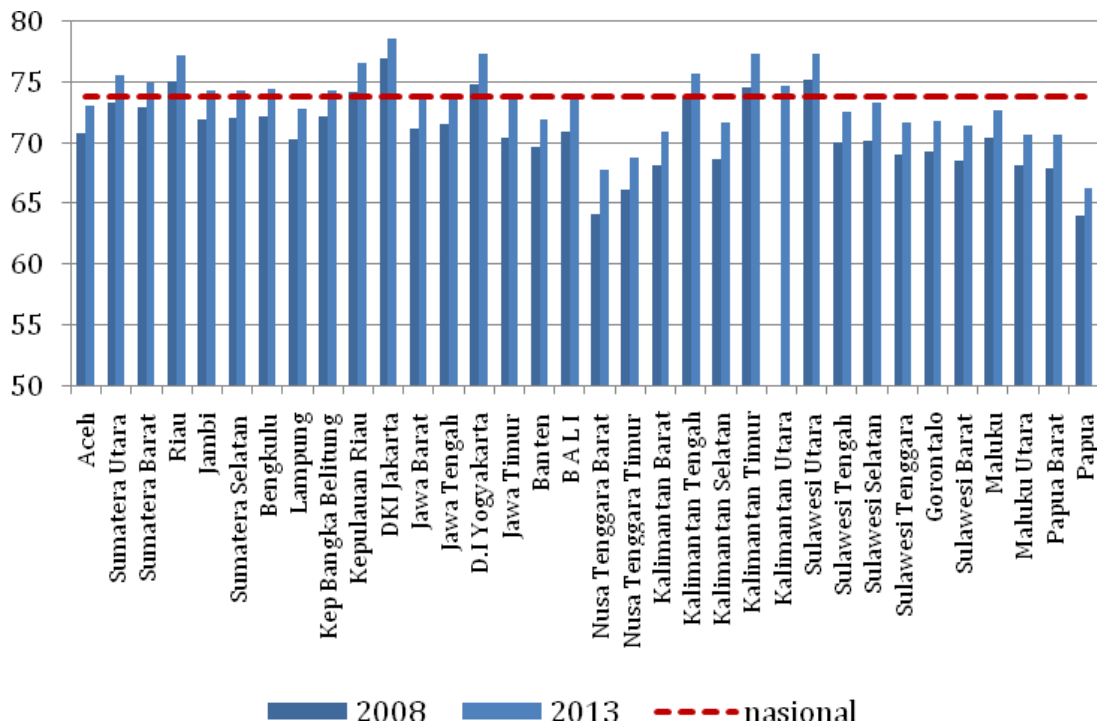


Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

5. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008, walaupun masih di bawah IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13). Dari 34 provinsi di Indonesia, IPM Sulawesi Tengah berada pada peringkat 23 dengan nilai IPM sebesar 72,54 pada tahun 2013.

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang mungkin menghambat pertumbuhan Sulawesi Tengah adalah kualitas sumber daya manusianya yang relatif rendah. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari 66,10 tahun pada tahun 2008 menjadi 67,21 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tengah meningkat dari 7,81 tahun pada 2008 menjadi 8,22 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Sulawesi Tengah pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 95,68 menjadi 96,22 persen, lebih tinggi dari capaian nasional 94,14 persen.

Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA di Sulawesi Utara meningkat dari 26,50 persen pada tahun 2008 menjadi 34,93 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Meskipun lulusan pendidikan SMP dan yang lebih rendah masih terus

meningkat, angkatan kerja dengan pendidikan minimal SMA juga meningkat. Perbaikan kualitas angkatan kerja ini menjadu modal untuk mendukung industrialisasi berbasis pertanian.

Tabel 8
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014 (Feb)	Perubahan
1	≤ SD	654.328	687.003	32.675
2	SMTP	225.483	242.150	16.667
3	SMTA Umum	232.787	352.014	119.227
5	Diploma I/II/III/Akademi	36.749	41.990	5.241
6	Universitas	47.641	104.662	57.021
Total		1.196.988	1.427.819	230.831

Sumber: BPS, 2014

6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Tabungan masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat turut menentukan aktivitas perekonomian. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi.

Rasio pinjaman terhadap simpanan di Sulawesi Tengah nilainya lebih besar dari satu dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan terbatasnya potensi simpanan masyarakat di Sulawesi Tengah, atau terdapat keterbatasan tabungan sebagai sumber modal masyarakat. Sebagai perbandingan, rasio pinjaman terhadap simpanan tahun 2013 untuk wilayah Sulawesi adalah 1,47 dan rasio untuk nasional adalah 0,92 (Tabel 9).

Tabel 9
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Sulawesi Tengah	11.981	21.507	1,80	1,06
Sulawesi	104.086	153.356	1,47	
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

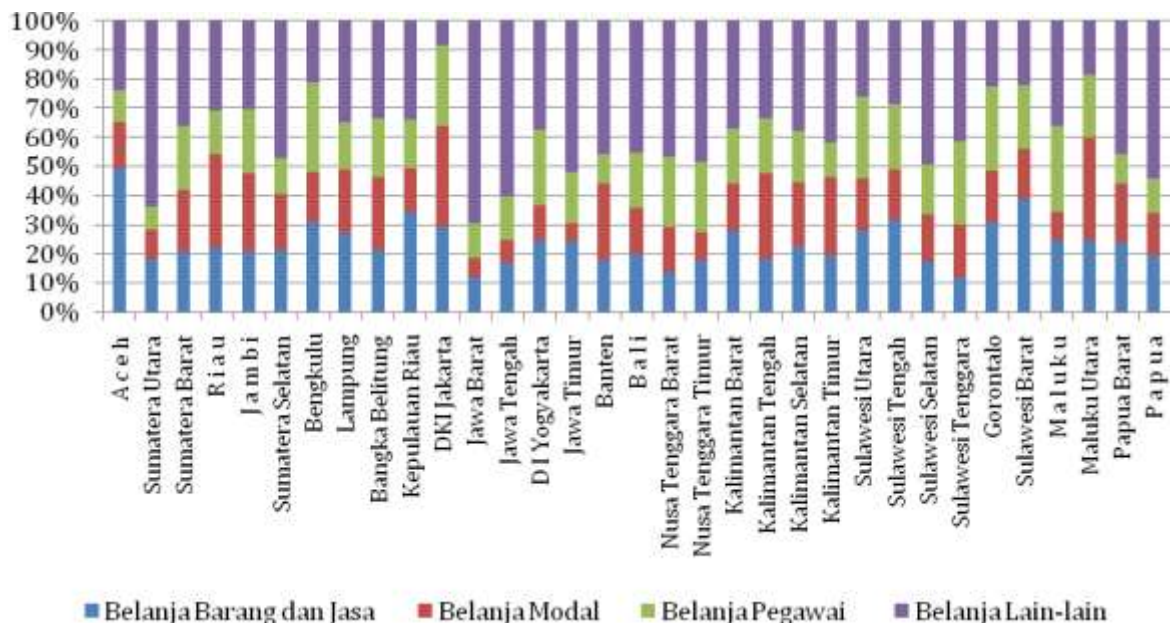
Sumber: BPS, 2013

Rasio PMTB terhadap simpanan di Sulawesi Tengah lebih besar dari satu, menunjukkan tingginya investasi fisik yang diperkirakan lebih fokus pada pengembangan industri pengolahan di daerah. PMTB adalah investasi yang dihitung dari penanaman modal yang menghasilkan nilai tambah.

7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Serapan belanja modal menunjukkan kinerja yang cukup rendah. Porsi belanja modal dalam total APBD Tahun 2013 Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 17,49 persen (Gambar 14). Sementara itu, komposisi dari belanja barang dan jasa sebesar 31,60 persen, belanja pegawai sebesar 22,12 persen, dan belanja lain-lain sebesar 28,79 persen. Belanja modal memiliki dampak langsung terhadap perekonomian sehingga perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini perlu lebih diarahkan pada belanja modal (komponen investasi). Investasi pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian karena merupakan perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Pertumbuhan wilayah Sulawesi Tengah pada tahun 2015 memiliki prospek baik, dengan ditentukan oleh seberapa besar realisasi investasi di wilayah tersebut. Daerah dengan tingkat pendapatan perkapita relatif rendah umumnya akan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena investasi akan memberikan tambahan output yang lebih tinggi. Tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah (indeks gini) selama periode 2008-2013 mengalami peningkatan dari angka 0,33 menjadi 0,41, sementara angka nasional bergerak dari 0,35 menjadi 0,4. Kesenjangan output antar kabupaten/ kota termasuk rendah secara nasional. Rendahnya tingkat kesenjangan ini akan mendukung upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan kerukunan sosial, dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan.

Percepatan pengembangan ekonomi Sulawesi diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Sulawesi Tengah dijadikan simpul perkebunan kakao. Posisi Sulawesi Tengah yang strategis tepat di tengah pulau Sulawesi, mengindikasikan pentingnya peran Sulawesi Tengah dalam pergerakan arus barang. Selain proyek-proyek infrastruktur utama yang secara langsung melewati Sulawesi Tengah, proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan lainnya juga diperkirakan akan hanya memberi manfaat besar pada Sulawesi Tengah khususnya dalam membuka akses Sulawesi Tengah dengan Provinsi di Pulau besar lainnya. Namun demikian, hal ini sangat bergantung pada aksesibilitas wilayah Sulawesi Tengah dan konektivitasnya kota dengan pelabuhan yang menghubungkan Sulawesi dengan pulau besar Indonesia lainnya.

Berdasarkan kinerja pembangunan serta modal pembangunan yang dimiliki, prospek Sulawesi Tengah dalam mencapai target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 7,6 – 8,9 persen dapat tercapai. Sulawesi Tengah memiliki sumber daya alam yang melimpah, terdiri dari subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan hingga pertambangan. Semakin banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi berdampak positif pada meningkatnya produksi dan ekspor tambang sehingga meningkatkan PDRB Sulawesi Tengah. Di samping itu, letak geografis Sulawesi Tengah antara Provinsi Sulawesi dan Kalimantan juga berdampak positif pada jalur perdagangan.
2. Kondisi terakhir kemiskinan Sulawesi Tengah tahun 2013 masih berada pada angka 14,6 persen, sementara itu sasaran dari buku III RPJMN di tahun 2019 adalah sebesar 13,7 – 9,7 persen, untuk itu diperlukan upaya lebih keras dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan dan mencapai sasaran pengurangan tingkat kemiskinan sesuai Buku III RPJMN 2015-2019. Selama kurun waktu 2014-2019 Sulawesi Tengah harus menurunkan persentase penduduk miskin 4,9 poin persentase atau 0,82 poin persentase per tahun.
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan, baik internal maupun eksternal. Dampak krisis di Eropa dan perlambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah.

E. Penutup

1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian
- b. Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja berkualitas
- c. Peningkatan investasi di daerah dan peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan
- e. Peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan antardaerah
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- g. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pengembangan dunia usaha pertanian melalui pengembangan teknologi, peningkatan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran dan ekspors hasil pertanian, dan program pengembangan SDM pertanian
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Peningkatan kualitas jaringan jalan dan irigasi;
- e. Peningkatan kapasitas/ suplai listrik wilayah
- f. Peningkatan akses pendidikan terutama pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
- g. Peningkatan kualitas belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.

